

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran diplomasi kota Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam penyelenggaraan Formula E pada periode 2022–2023. Analisis ini ditempatkan dalam konteks permasalahan lingkungan perkotaan Jakarta yang telah lama menjadi isu krusial, khususnya terkait kualitas udara dan tingginya tingkat polusi. Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa persoalan lingkungan di Jakarta tidak bersifat insidental, melainkan struktural dan berkaitan erat dengan pola pembangunan perkotaan, mobilitas, serta tata kelola kota. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan dan kualitas hidup masyarakat, tetapi juga membentuk persepsi negatif terhadap Jakarta di tingkat nasional maupun internasional. Dalam konteks inilah Formula E diposisikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai salah satu instrumen diplomasi kota untuk merespons tantangan tersebut.

Sebagai aktor subnasional, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berada dalam posisi yang unik dalam hubungan internasional. Di satu sisi, pemerintah daerah tidak memiliki kewenangan untuk membentuk perjanjian internasional yang mengikat sebagaimana negara. Namun, di sisi lain, Jakarta tetap dituntut untuk menunjukkan kapasitas dan komitmen dalam merespons isu-isu global, khususnya yang berkaitan dengan perubahan iklim dan keberlanjutan lingkungan. Keterbatasan formal ini membuka ruang bagi praktik diplomasi kota, di mana pemerintah kota dapat memanfaatkan kerja sama internasional, jejaring global, simbol, serta agenda tematik untuk memperkuat posisi dan citra kota di tingkat global. Formula E menjadi salah satu medium yang dipilih untuk menjalankan praktik diplomasi kota tersebut.

Strategi diplomasi kota Jakarta dalam penyelenggaraan Formula E dibangun secara bertahap dan saling terhubung. Prosesnya dimulai sejak tahap awal pengajuan dan negosiasi Jakarta sebagai kota tuan rumah Formula E melalui

komunikasi langsung dengan Formula E Operations. Pada tahap ini, pengambilan keputusan dipusatkan pada aktor eksekutif daerah dengan tujuan mengamankan posisi Jakarta dalam jejaring kota penyelenggara Formula E dan menjaga posisi tawar kota di tengah persaingan antarkota global. Strategi ini kemudian diperkuat melalui penguatan kerja sama kelembagaan yang melibatkan berbagai aktor lintas level, mulai dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, BUMD, lembaga nasional, hingga aktor internasional seperti FIA dan Formula E Operations, agar penyelenggaraan dapat memenuhi standar teknis, keselamatan, dan tata kelola ajang global. Di saat yang sama, Jakarta juga memanfaatkan jejaring global, agenda internasional, diplomasi budaya, serta media digital untuk memperluas relasi dan menyebarkan narasi kota tanpa harus bergantung pada mekanisme diplomasi formal.

Melalui rangkaian strategi tersebut, diplomasi kota Jakarta melalui Formula E menghasilkan sejumlah peran yang dapat diidentifikasi secara jelas. Salah satu peran utama adalah peningkatan visibilitas dan kredibilitas Jakarta di ruang internasional. Penyelenggaraan Jakarta E-Prix memberikan eksposur global melalui liputan media internasional, arus wisatawan mancanegara, serta keterkaitan dengan agenda keberlanjutan dan transisi energi. Visibilitas ini tidak hanya berfungsi sebagai promosi kota, tetapi juga menjadi sarana untuk merespons persepsi negatif yang selama ini melekat pada Jakarta, khususnya terkait isu lingkungan. Pada saat yang sama, pemenuhan standar internasional dalam aspek infrastruktur, keselamatan, dan manajemen penyelenggaraan turut membentuk kredibilitas Jakarta sebagai kota yang mampu mengelola event global secara profesional.

Selain pada aspek reputasional, Formula E juga berperan dalam menggerakkan sirkulasi ekonomi perkotaan. Penyelenggaraan event ini mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, seperti pariwisata, perhotelan, transportasi, konsumsi, serta membuka ruang keterlibatan bagi pelaku UMKM lokal. Dampak ekonomi yang tercipta menunjukkan bahwa diplomasi kota Jakarta melalui Formula E tidak hanya beroperasi pada tataran simbolik, tetapi juga memiliki dimensi material yang berkontribusi terhadap perekonomian kota. Dalam konteks ini, Formula E berfungsi sebagai katalis ekonomi sekaligus memperkuat

posisi Jakarta sebagai kota yang memiliki potensi besar dalam pengembangan pariwisata berbasis event dan kegiatan berskala internasional.

Di sisi lain, Formula E juga berperan sebagai instrumen soft power kota yang bekerja melalui pengalaman sosial dan partisipasi publik. Keterlibatan masyarakat, relawan, komunitas kreatif, serta generasi muda dalam penyelenggaraan event membentuk pengalaman kota yang berkontribusi pada citra Jakarta sebagai kota yang terbuka, ramah, dan progresif. Interaksi sosial yang tercipta selama penyelenggaraan Jakarta E-Prix memperlihatkan bahwa diplomasi kota tidak hanya dijalankan oleh pemerintah, tetapi juga diperkuat oleh partisipasi warga sebagai duta informal yang membentuk persepsi pengunjung terhadap Jakarta. Dalam kerangka ini, pengalaman mikro pengunjung menjadi elemen penting dalam pembentukan citra kota secara keseluruhan.

Namun demikian, penelitian ini juga menunjukkan bahwa strategi dan peran diplomasi kota Jakarta melalui Formula E masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Penerimaan publik yang tidak sepenuhnya selaras dengan narasi resmi pemerintah menunjukkan adanya kesenjangan antara wacana global yang dibangun dan pengalaman masyarakat di tingkat lokal. Kritik terhadap prioritas anggaran, transparansi kebijakan, serta politisasi Formula E memperlihatkan bahwa legitimasi diplomasi kota tidak hanya ditentukan oleh pengakuan internasional, tetapi juga sangat bergantung pada dukungan publik domestik. Selain itu, persoalan tata kelola anggaran, kesiapan infrastruktur, serta kapasitas sumber daya manusia menunjukkan bahwa peran diplomasi kota Jakarta masih sangat bergantung pada momentum event dan belum sepenuhnya terlembagakan dalam kebijakan jangka panjang.

Analisis wacana terhadap narasi resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menunjukkan bahwa Formula E diproduksi sebagai simbol modernitas, keberlanjutan, dan masa depan kota. Namun, narasi tersebut berhadapan dengan wacana tandingan di ruang publik yang mempertanyakan relevansi, prioritas, dan dampak nyata Formula E bagi warga. Kondisi ini menunjukkan bahwa diplomasi kota tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi eksternal, tetapi

juga menjadi arena kontestasi makna di tingkat domestik. Dengan demikian, keberhasilan diplomasi kota tidak dapat diukur semata-mata dari tingkat visibilitas internasional, tetapi juga dari sejauh mana narasi global tersebut mampu diterjemahkan ke dalam kebijakan lokal yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Berdasarkan keseluruhan temuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa diplomasi kota Jakarta dalam penyelenggaraan Formula E tahun 2022–2023 dijalankan melalui strategi yang saling terhubung dan menghasilkan peran multidimensional bagi kota. Formula E berkontribusi dalam meningkatkan visibilitas dan kredibilitas Jakarta di tingkat global, menggerakkan sirkulasi ekonomi perkotaan, serta memperkuat soft power kota melalui pengalaman sosial dan partisipasi publik. Namun, efektivitas peran tersebut masih sangat bergantung pada konsistensi kebijakan, legitimasi publik, dan keberlanjutan pembangunan kota di tingkat lokal. Oleh karena itu, Formula E dapat dipahami sebagai instrumen diplomasi kota yang penting dan strategis, tetapi belum sepenuhnya optimal tanpa dukungan kebijakan jangka panjang yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan warga.

## 5.2 Saran

Sebagai penutup dari rangkaian pembahasan dan kesimpulan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, bagian ini memaparkan saran-saran yang dapat dijadikan landasan tindak lanjut oleh para pemangku kepentingan terkait. Saran-saran tersebut disusun dengan mempertimbangkan temuan penelitian, keterbatasan yang diidentifikasi, serta konteks dinamika kebijakan maupun praktik di lapangan sehingga diharapkan mampu memperkaya wacana akademik sekaligus memberikan arahan praktis yang aplikatif dan berkelanjutan

### 5.2.1 Saran Praktis

Berdasarkan temuan penelitian dan analisis diskursus yang dilakukan, penelitian ini mengajukan empat saran utama yang dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan efektivitas diplomasi kota Jakarta melalui penyelenggaraan event internasional seperti Formula E di masa mendatang. Keempat saran ini disusun dengan mempertimbangkan kesenjangan antara narasi yang dibangun dalam ruang diplomasi kota dan dinamika kebijakan serta pengalaman perkotaan di tingkat lokal.

Pertama, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu memperkuat keselarasan antara narasi keberlanjutan yang dikomunikasikan melalui Formula E dan kebijakan struktural yang diterapkan secara nyata. Analisis diskursus menunjukkan bahwa wacana mengenai “kota berkelanjutan” dan transisi menuju transportasi rendah emisi telah menjadi bagian penting dari pesan diplomasi kota Jakarta, namun implementasinya masih menunjukkan capaian yang tidak merata. Kondisi ini berisiko menempatkan keberlanjutan sebagai praktik simbolik yang berfungsi untuk membangun citra progresif di tingkat global, tanpa dukungan kebijakan yang cukup kuat di tingkat lokal. Oleh karena itu, percepatan perluasan armada transportasi publik berbasis listrik, pengembangan infrastruktur pengisian daya, serta integrasi antarmoda transportasi perlu diposisikan sebagai bagian dari strategi diplomasi kota, bukan sekadar kebijakan sektoral. Dengan cara ini, pesan keberlanjutan yang disampaikan melalui event internasional dapat diperkuat oleh praktik kebijakan yang konsisten dan berkelanjutan.

Kedua, tata kelola pendanaan dan mekanisme pengambilan keputusan dalam penyelenggaraan event internasional perlu dirancang secara lebih transparan dan terstruktur sejak tahap perencanaan awal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa polemik terkait *commitment fee*, penggunaan skema pinjaman Bank DKI, serta keterbatasan pelibatan DPRD telah memunculkan resistensi publik yang berdampak pada efektivitas diplomasi kota itu sendiri. Ketidakjelasan prosedur ini tidak hanya memicu perdebatan politik domestik, tetapi juga berpotensi melemahkan kredibilitas Jakarta sebagai mitra dalam kerja sama internasional. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu

mengembangkan standar prosedur yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran, konsultasi lintas lembaga, serta evaluasi risiko kebijakan. Penguatan tata kelola tersebut menjadi fondasi penting agar diplomasi kota dapat berjalan secara berkelanjutan dan memperoleh legitimasi, baik di tingkat lokal maupun global.

Ketiga, peningkatan kualitas pengalaman ruang kota dan pemenuhan prasyarat dasar perkotaan menjadi aspek penting untuk menjaga konsistensi antara narasi kota global yang diproyeksikan melalui diplomasi kota dan pengalaman nyata yang dirasakan oleh pengunjung serta aktor internasional. Penelitian ini menemukan bahwa pembangunan sirkuit dan kawasan pendukung Formula E memperoleh apresiasi sebagai simbol kesiapan Jakarta menjadi tuan rumah event berskala global. Namun demikian, kritik terhadap aksesibilitas kawasan, keterbatasan fasilitas publik yang nyaman, serta kerentanan wilayah pesisir Ancol menunjukkan bahwa kesiapan ruang kota belum sepenuhnya sejalan dengan ambisi diplomasi kota yang diusung. Pemerintah daerah dapat menjadikan temuan ini sebagai dasar untuk memperkuat infrastruktur mobilitas perkotaan, mitigasi risiko lingkungan, serta penyediaan fasilitas publik yang mendukung penyelenggaraan event internasional secara berkelanjutan. Dengan demikian, diplomasi kota tidak hanya ditampilkan melalui visualisasi event, tetapi juga melalui kualitas ruang kota yang dapat dipertanggungjawabkan.

Keempat, diplomasi kota Jakarta perlu dikembangkan secara lebih inklusif dengan membuka ruang partisipasi publik dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi event internasional. Munculnya penolakan publik, petisi pembatalan, serta polarisasi politik selama penyelenggaraan Formula E menunjukkan bahwa legitimasi sosial merupakan elemen yang tidak dapat diabaikan dalam praktik diplomasi kota. Tanpa dukungan masyarakat lokal, diplomasi kota berisiko dipersepsikan sebagai proyek elitis yang terlepas dari kebutuhan warga. Oleh karena itu, pemerintah daerah dapat mengembangkan mekanisme konsultasi publik yang lebih substantif, forum deliberatif, serta kanal partisipasi digital untuk menampung aspirasi warga sebelum keputusan strategis diambil. Pendekatan partisipatif ini tidak hanya memperkuat

legitimasi kebijakan di tingkat lokal, tetapi juga meningkatkan daya tahan diplomasi kota terhadap dinamika politik domestik.

Secara keseluruhan, keempat saran tersebut menegaskan bahwa efektivitas diplomasi kota Jakarta tidak dapat bergantung pada performativitas penyelenggaraan Formula E semata. Diplomasi kota perlu diperkuat melalui kebijakan keberlanjutan yang substansial, tata kelola yang transparan, kesiapan ruang kota yang memadai, serta legitimasi sosial yang kuat. Dengan fondasi tersebut, Jakarta dapat menjalankan diplomasi kota secara lebih konsisten dan kredibel sebagai aktor subnasional dalam arena global.

### 5.2.2 Saran Teoritis

Secara teoretis, penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi kota dalam konteks kota global seperti Jakarta tidak lagi memadai apabila dipahami semata sebagai perluasan peran kota ke ranah internasional. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa diplomasi kota juga berfungsi sebagai arena tarik-menarik antara ambisi global pemerintah daerah, keterbatasan kapasitas institusional, serta dinamika politik dan resistensi di tingkat lokal. Dengan demikian, diplomasi kota tidak bersifat netral atau teknokratis, melainkan terikat pada relasi kuasa, proses legitimasi, dan konflik kepentingan yang menyertainya. Perspektif ini membuka ruang bagi pengembangan konsep diplomasi kota yang lebih peka terhadap dimensi kontestasi, polarisasi politik, serta risiko “eventisasi” kebijakan, yaitu kecenderungan menjadikan event internasional sebagai instrumen utama representasi global tanpa transformasi kebijakan yang sepadan.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa sport mega-event seperti Formula E dapat beroperasi sebagai simbol prestise global yang membawa klaim keberlanjutan dan modernitas, namun pada saat yang sama berpotensi memunculkan ketegangan ketika simbol tersebut tidak diiringi oleh perubahan struktural yang nyata. Kondisi ini membuka peluang bagi penelitian selanjutnya untuk mengkaji diplomasi kota melalui lensa kritis, misalnya dengan melihat Formula E sebagai bentuk green prestige

atau bahkan praktik greenwashing dalam konteks subnasional. Pendekatan semacam ini memungkinkan analisis diplomasi kota tidak hanya berfokus pada pencapaian reputasional di tingkat global, tetapi juga pada kesenjangan antara wacana, kebijakan, dan praktik di tingkat lokal.

Saran teoretis berikutnya berkaitan dengan desain dan pendekatan penelitian di masa mendatang. Studi ini menunjukkan pentingnya mengkaji diplomasi kota sebagai praktik multidimensional yang melibatkan jejaring global, kebijakan lokal, serta persepsi dan pengalaman warga secara simultan. Oleh karena itu, penelitian lanjutan dapat mengembangkan pendekatan komparatif dengan membandingkan Jakarta dan kota-kota lain dalam kalender Formula E guna mengidentifikasi variasi strategi diplomasi kota, kapasitas institusional, serta jenis warisan kebijakan yang dihasilkan. Pendekatan ini akan memperkaya pemahaman mengenai bagaimana konteks politik, ekonomi, dan tata kelola lokal membentuk praktik diplomasi kota di berbagai wilayah.

Selain itu, pengembangan metode penelitian yang mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif juga menjadi penting untuk memperdalam analisis teoretis. Pengukuran persepsi warga terhadap legitimasi diplomasi kota, survei kepuasan publik, serta analisis wacana media dapat digunakan secara bersamaan untuk menangkap dinamika diplomasi kota di ruang publik. Melalui pendekatan tersebut, Formula E Jakarta tidak hanya diposisikan sebagai studi kasus tunggal, tetapi sebagai laboratorium konseptual untuk menguji ulang batas-batas, tantangan, dan potensi diplomasi kota dalam konteks negara berkembang.